Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page 29450-29456

Pengelolaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang)

Natasya Desri Ladang[1], Dr. Maria M Lino[2], Delila A. Nahak Seran[3], Umbu T.W Pariangu[4]
[1,2,3] **Universitas Nusa Cendana**
e-mail: desryladang22@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui begaimana pengelolaan pajak parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan empat indikator perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perencanaan target tidak sesuai realita penetapan target penerimaan seringkali tidak didasarkan keadaan rill di lapangan. Pengorganisasian terdapat kendala intervensi dan kurangnya sumber daya manusia jumlah pengawas sedikit di banding objek pajak. Pelaksanaan di lapangan terhambat oleh kurangnya pemahaman juru parkir dan pengguna jasa parkir sehingga penyetoran tidak optimal dan bisa terjadi penyimpangan tarif. Kurangnya pengawasan sehingga gagal menguji kebenaran omset dan ketidaktegasan penindakan dalam menjatuhkan sanksi. Kesimpulannya pengelolaan pajak parkir belum optimal sehingga realisasi penerimaan pajak parkir tidak mencapai target yang ditetapkan.

Kata kunci: pengelolaan, pajak parkir, pad, poac, kota kupang

ABSTRACT

This study aims to determine how parking tax management can be used to increase local revenue in Kupang City. This study uses a qualitative descriptive approach with four indicators: planning, organization, mobilization, and supervision.The results show that the implementation of target planning is not in line with reality, as the setting of revenue targets is often not based on actual conditions in the field. Organization faces obstacles in the form of intervention and a lack of human resources, with the number of supervisors being small compared to the number of tax objects. Implementation in the field is hampered by a lack of understanding on the part of parking attendants and parking service users, resulting in suboptimal deposits and possible tariff irregularities. The lack of supervision has resulted in a failure to verify turnover and indecisiveness in imposing sanctions. In conclusion, parking tax management is not yet optimal, so that the realization of parking tax revenue has not reached the set target.

Keywords: parking tax management, local revenue, poac , kupang city

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Peningkatan volume Pembangunan dan pertumbuhan populasi di daeah menuntut peran pemerintah daerah yang lebih mandiri melalui otonomi fiskal. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memobilisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan secara berkesinambungan tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memegang

peran sentral dalam perencanaan, Pelaksanaan, dan pengendalian pemungutan pendapatan daerah, termasuk pajak parkir. Sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkembang pesat, Kota Kupang menghadapi mobilitas penduduk yang tinggi seiring bertumbuhnya pusat perbelanjaan dan tempat hiburan. Kondisi ini secara linear meningkatkan kebutuhan akan ruang parkir, baikparkir tepi jalan umum (Retribusi) maupun penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan (Pajak Parkir).

Permasalahan muncul dalam optimalisasi penerimaan dari sektor ini. Sebagai ilustrasi, pada tahun anggaran 2024, target pendapatan parkir umum Kota Kupang mengalami eskalasi signifikan dari Rp 3,75 miliar menjadi Rp 6,25 miliar dalam perubahan APBD. Namun, penetapan target dan pengelolaan di lapangan masih menghadapi tantangan objektivitas data potensi. Idealnya, penentuan potensi harus didasarkan pada survei jumlah kendaraan oleh tim independen agar target yang ditetapkan bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakakuratan data potensi dan kelemahan dalam manajemen operasional berisiko menyebabkan kebocoran PAD dan ketidaktercapaian target pembangunan daerah. Berikut ini merupakan Data Retribusi Parkir, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2023:

Tabel 1.1 Data Retribusi Parkir, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2020-2023

Tahun	Retribusi Parkir	Realisasi Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah
2020	259.849.900	96.801.337.486	167.630.108.045,48
2021	299.800.500	90.570.000.000	166.266.172.886,05
2022	526.157.500	110.740.000.000	186.123.428.092,83
2023	700. 816.600	113.950.000.000	175.243.596.388,00

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang 2025).

Berdasarkan Data keuangan tahun 2020–2023 di atas menunjukkan tren positif pada seluruh instrumen pendapatan daerah Kota Kupang. Retribusi parkir mengalami eskalasi signifikan dari Rp259 juta menjadi lebih dari Rp700 juta, yang diikuti oleh kenaikan pajak daerah dari Rp92,8 miliar menjadi Rp113,95 miliar. Pertumbuhan ini berimplikasi langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai lebih dari Rp175, 24 miliar pada tahun 2023.

Secara konseptual, perparkiran merupakan subsistem integral dari manajemen transportasi publik. Namun, dalam realitas operasional, sektor ini sering kali menjadi titik krusial permasalahan transportasi. Meskipun menghadapi tantangan manajerial, optimalisasi penyediaan ruang dan jasa parkir tetap menjadi variabel strategis karena kontribusi positifnya terhadap penguatan struktur PAD melalui penerimaan retribusi parkir jalan umum. Berikut merupakan data Target dan Realisasi parkir Kota Kupang tahun 2020-2023:

Tabel 1.2 Data Realisasi Penerimaan dan Target Parkir Kota Kupang Tahun 2020-2023

Tahun	Target Parkir Pajak	Realisasi Pajak Parkir	Presentase (%)

2020	905. 522.548	811. 531.720	89%
2021	1.050. 000.000	621. 878.408	59,23%
2022	1.000. 000.000	1.020. 397.337	102,04%
2023	1.400. 000.000	1.317 .224.995	94,09%

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang 2025.)

Berdasarkan data di atas data Target dan Realisasi Pajak Parkir tahun 2020–2023 menunjukkan kenaikan target pajak parkir di Kota Kupang yang didorong oleh peningkatan volume kendaraan, pertumbuhan ekonomi, dan penyesuaian tarif. Namun, efektivitas strategi pengelolaan dipertanyakan karena realisasi yang fluktuatif (89% pada 2020, 59,23% pada 2021, dan 94% pada 2023). Meskipun nominal pendapatan meningkat, ketidaktercapaian target persentase mengindikasikan adanya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap optimal.

Hambatan utama dalam optimalisasi PAD sektor parkir adalah maraknya praktik pungutan liar dan parkir ilegal di bahu jalan atau trotoar. Kehadiran oknum juru parkir tidak resmi tidak hanya mengurangi setoran kas daerah, tetapi juga mengganggu tata kota dan menurunkan kinerja Badan Pendapatan Daerah. Dengan 131 lokasi parkir khusus dan 141 lokasi parkir umum, diperlukan peran aktif instansi terkait untuk menertibkan fenomena parkir liar yang merugikan kepentingan publik.

Proyeksi PAD Kota Kupang tahun 2025 yang meningkat menjadi Rp331 miliar dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama perubahan kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor dari Provinsi NTT sebesar 66%. Di tengah lonjakan target pajak daerah sebesar 91,76%, efektivitas pengelolaan pajak parkir secara mandiri menjadi instrumen krusial bagi kemandirian fiskal daerah agar tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atasan. Pengelolaan Penelitian ini menggunakan kerangka kerja George R. Terry (POAC) untuk menganalisis problematika pengelolaan parkir secara sistematis. Evaluasi dilakukan pada aspek perencanaan (*Planning*) terkait data potensi, pengorganisasian (*Organizing*) terkait kejelasan peran staf, pelaksanaan (*Actuating*) terkait integritas petugas lapangan, serta pengawasan (*Controlling*) terkait transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Permasalahan sektor parkir di Kota Kupang meluas hingga aspek legalitas dan kualitas layanan, seperti penggunaan karcis fotokopi non-prosedural yang memicu keraguan masyarakat. Kondisi ini menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem retribusi daerah.

Berdasarkan kompleksitas masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengelolaan parkir guna merumuskan rekomendasi yang efektif untuk meningkatkan kontribusi sektor parkir terhadap PAD Kota Kupang. Dengan demikian penelitian ini diberi judul "Pengelolaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota kupang"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cendrerung menggunakan analisis. Sumber data yang digunakan dalam peneltian

ini terbagi atas dua yaitu yang pertama adalah sumber data primer yang berasal dari pengamatan dan wawancara dengan informan penelitian. Sedangkan yang kedua adalah sumber data sekunder, merupakan sumber daya yang berasal dari literatur seperti dokumen, artikel, buku, skripsi, jurnal dan sebagainya. Berikutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik yang digunakan dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang cara pnegambilan datanya berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiono, 2017). Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Kasubag Perencanaan dan keuangan BAPENDA, staf pegawai BAPENDA, Juru Parkir, Masyarakat. Teknik Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses penggumpulan data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran instansi terkait dengan pungutan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah PAD seperti retribusi daerah. Dalam konteks ini, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian, dengan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi optimalisasi pendapatan dari pajak parkir. Pengelolaan ini mencakup penetapan peraturan, perencanaan target berdasarkan potensi area parkir, penarikan retribusi baik di tepi jalan maupun tempat khusus melalui juru parkir yang dikelola oleh dinas terkait, serta upaya pengawasan dan penegakan hukum untuk mengatasi juru parkir liar dan masalah lainnya.

Untuk melihat pengelolaan Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam mengelola pajak parkir dalam menigkatkan PAD Kota Kupang, maka peneliti menggunakan Teori George R. Terry (2018) dengan empat indikator yakni Planning, Organizing, Actuating, dan Controling. Hasil Penelitian sebagai berikut:

1. Planning

Perencanaan merupakan proses paling awal untuk menentukan tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan, dengan perencanaan yang jelas dan terukur maka tujuan yang akan dijalankan akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Koonts and Donnel dalam Hasibuan, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan- tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program- program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah memilih yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Sejauh mana Bapenda dalam melakukan perecanaan pemilihan fakta-fakta satu dengan yang lain kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan tindakan untuk masa yang akan datang untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

Bedasarkan hasil wawancara bersama Kasubag, Perenanaan dan Keuangan dapat disimpulkan bahwa banyak titik parkir yang belum terdata seperti banyak lokasi parkir komersial baru yakni ruko atau kafe besar yang sebenarnya memenuhi syarat sebagai wajib pajak parkir belum di data yang seharusnya

mengasilkan pendapatan jauh lebih besar, proses penetapan target parkir tidak berdasarkan hasil survei potensi yang ada dan menggunakan data potensi parkir yang lama. Maka ditetapkan strategi dan identifikasi potensi pendapatan untuk mencapai target yang diinginkan dengan melakukan penagihan, pendataan, dan monitoring per-minggu. Hasil penelitian terkait planning ini sejalan dengan penelitian Puji Lestari Marpaung (2022) yang telah dilakukan dalam melaksanakan manajemen parkir guna peningkatan PAD pihak Perumda Parkir Kota Denpasar selaku penanggung jawab telah menjalankan tahapan perencanaan dan pelaksanaannya ternyata belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan perencanaan yang dilakukan pihak Perumda Parkir Kota Denpasar yaitu menentukan target-target yang harus dicapai.

2. Organizing

Proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut (Hasibuan 2012) pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu, berdasarkan hasil wawancara bersama informan Bapak Danto Lobang SDM secara keseluruhan, koordinasi dan tumpang tindih data pemisahan kewenangan belum optimal meskipun terjadi pemisahan tugas antara pajak parkir Bapenda dan retribusi parkir Dishub, koordinasi data potensi di lapangan termasuk penertiban parkir liar yang seharusnya menjadi objek pajak atau retribusi masih perlu ditingkatkan. Kebutuhan Integrasi Data Pengorganisasian yang efektif menuntut adanya integrasi data. Hasil dari penelitian ini selaras dengan hasil penelitian oleh Siti Airinda Marennu (2022) bahwa pengelolaan retribusi parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Makassar dilakukan perusahaan daerah belum optimal. Hal tersebut disebabkan dalam pelaksanaan dilapangan itu pengawasan yang dilakukan oleh petugas juga belum efektif karena minimnya jumlah petugas pengawas, sedangkan juru parkir dilapangan lebih banyak.

3. Actuating

Fungsi ini mencakup pemberian motivasi, pengarahan, koordinasi, dan kepemimpinan agar setiap petugas dan Wajib Pajak bertindak sesuai dengan tugas, wewenang, dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah diorganisir. pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Dalam konteks *Actuating* kurangnya pemahaman juru parkir berdampak pada keseluruhan sektor parkir, kurangnya pembinaan dan pengawasan membuat juru parkir melakukan penyimpangan tarif dan tidak memberikan karcis resmi masuk dalam kategori parkir liar (Kegagalan *Actuating* dalam pembinaan SDM). Hasil dari penelitian ini selaras dengan hasil penelitian oleh Siti Airinda

Marennu (2022) bahwa pengelolaan retribusi parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Makassar dilakukan perusahaan daerah belum optimal. Hal tersebut disebabkan dalam pelaksanaan dilapangan masih menuai banyak masalah seperti masih maraknya parkir liar, setoran kepada preman, dan banyak masalah keamanan shingga berdampak pada pendapatan parkir tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu pengawasan yang dilakukan oleh petugas juga belum efektif karena minimnya jumlah petugas pengawas, sedangkan juru parkir dilapangan lebih banyak.

4. Controling

Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengungkapkan mekanisme pengawasan dan sanksi yang diterapkan terhadap juru parkir yang terbukti menyimpang, terutama terkait praktik pungutan liar. Mekanisme pengawasan dilakukan secara rutin oleh pengawas lapangan. Sanksi yang diterapkan adalah teguran keras, pencabutan Kartu Tanda Juru Parkir (KTJP), hingga pemecatan, namun seringkali terdapat kendala di lapangan. Selain itu, ditegaskan bahwa dalam penindakan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, penting untuk bersikap tegas dan konsisten agar tidak mudah menyerah atau goyah oleh intervensi eksternal. Pengawasan Tidak Berujung Penindakan, fungsi *Controlling* terputus di tengah jalan. Temuan penyimpangan (*under-reporting*) dan tunggakan tidak selalu diikuti oleh penindakan tegas (penyegelan), yang berarti tujuan *Controlling* untuk memastikan tercapainya *Planning* telah gagal karena faktor non-teknis. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Puji Lestari Marpaung (2022) Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas parkir tentunya diberikan teguran oleh pihak PD Parkir Kota Denpasar apabila ditemukan pelanggaran seperti parkir ilegal, tarif yang tidak sesuai, atribut yang tidak lengkap dan pelanggaran lainnya maka pihak Perumda Parkir tidak segan memberikan teguran bahkan mencabut surat izin telah ditetapkan sebelumnya dan pengawasan ini dilakukan oleh Koordinator Parkir yang selalu turun langsung kelapangan dalam hal mengawasi para petugas parkir. Kekurangan dalam pengawasan langsung yaitu waktu pengawasan yang tidak pasti jadi tidak dicek terus menerus bisa saja saat tidak melakukan pengecekan banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan.

KESIMPULAN

Pengelolaan pajak parkir oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam meningkatkan Pendapatan Daerah yang telah dijelaskan dapat disimplkan bahwa: *Planning* (Perencanaan) Penetapan target penerimaan seringkali terlalu ambisius dan tidak sepenuhnya didasarkan pada perhitungan potensi riil yang akurat di lapangan. *Organizing* (Pengorganisasian) Organisasi sudah ada (UPTD/Bidang Pajak), namun rasio jumlah petugas pengawas sangat kecil dibandingkan jumlah objek pajak, dan sarana teknologi (*tapping box*) belum merata. *Actuating* (Pelaksanaan) Terdapat indikasi bahwa data potensi parkir

yang digunakan sebagai basis penetapan target belum sepenuhnya akurat dan belum mencakup pertumbuhan titik parkir baru secara komprehensif masih didasari menggunakan data usang. Pelaksanaan di lapangan terhambat oleh kurangnya pemahaman juru parkir pada retribusi yang berdampak citra, dan kegagalan wajib pajak besar melakukan setoran optimal akibat *under-reporting* yang tidak terdeteksi. *Controlling* (Pengawasan) Ini adalah kelemahan inti, Bapenda gagal menguji kebenaran omzet WP secara intensif dan tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi penyegelan atau denda karena adanya intervensi/pertimbangan politik dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Kupang. (2 Juli 2024). Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Kupang Menurut Jenis Pendapatan, 2022-2023. Diakses pada 8 Mei 2024.https://kupangkota.bps.go.id/id/statisticstable/2/NDI2IzI=/realisasi-pendapatan-pemerintah-kota-kupang-menurut jenis-pendapatan.html

Hasibuan, Malayu Sp. 2012. Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan Ke Tigabelas. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung : Alfabeta 2017)

Supomo, & Nurhayati. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Miles, Matthew B., Huberman, A Michael.,& Johnny Saldana. (2014). Qualitative

Data Analysis: A Methods Sourcebook (Edition III). SAGE Publications.

Marennu, S. A. (2023). Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Marpaung, P. L. (2022). Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar (Studi Kasus : Perusahan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma).

Terry, George R, 2009. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Whitney, C.W., Lind, B.K., Wahl, P.W. (1998). Quality Assurance And Quality

Control In Longitudinal Studies. Epidemiologic Reviews, 20(1): 71-80.tration Review, 67(5), 861-879.